

No. Katalog : 1201005.52

RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2015 - 2019



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

RENCANA STRATEGIS

BPS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2015-2019

ISBN : 978-602-1059-19-7
No. Publikasi : 52510.1501
Katalog BPS : 1201010.52
Ukuran Buku : B5 (18,2 cm x 25,7 cm)
Jumlah Halaman : viii + 63 halaman

Naskah :

Sub Bagian Bina Program
BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Gambar Kulit :

BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Diterbitkan oleh :

BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

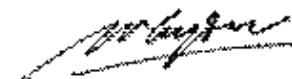
KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2015-2019 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk 5 (lima) tahun ke depan yang mengacu Renstra BPS. Renstra BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode 2010-2014 dan analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis yang terjadi di BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Renstra BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat menjabarkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan teknis dan administrasi dalam mendukung kegiatan teknis dan administrasi BPS dalam kurun waktu 2015-2019. Selanjutnya dokumen Renstra ini menjadi acuan masing-masing bidang/seksi di lingkup BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat. dan diimplementasikan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ucapan terima kasih ditujukan kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan sampai penerbitan Renstra ini. Kritik dan saran untuk perbaikan Renstra ini sangat kami hargai. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha dan upaya kita. Amin.

Mataram, Juni 2015
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Drs. Wahyudin, MM

RINGKASAN EKSEKUTIF

BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Renstra BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019 menjadi acuan bagi seluruh jajaran BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pendukung kelancaran penyelenggara kegiatan teknis dan administrasi statistik dalam melaksanakan visi dan misi BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya serta pembangunan nasional di bidang statistik pada umumnya selama 2015-2019.

Visi BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana visi BPS adalah *“Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”*. Untuk dapat mewujudkan visi ini, BPS telah merumuskan 3 pernyataan misi, yakni: (1) menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi, berstandar nasional dan internasional; (2) memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan (3) membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Melalui pernyataan visi dan misi BPS tersebut, BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki aspirasi untuk mencapai sejumlah tujuan strategis, yaitu: (1) peningkatan kualitas data statistik; dan (2) peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; (3) peningkatan birokrasi yang akuntabel. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam

periode Renstra 2015–2019, yakni bahwa BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat berupaya terus-menerus untuk meningkatkan: (1) kualitas dari produk yang dihasilkannya (data statistik); (2) kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunaannya; dan (3) kualitas dari proses tata kelola (governance) di dalam organisasinya.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis diwadhahi dalam sejumlah program, yakni: (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS); (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL); (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA).

Pada akhirnya, seluruh penjabaran tujuan serta sasaran strategis dalam Renstra BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015–2019 tersebut akan menjadi pedoman bagi BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mewujudkan visinya sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kondisi Umum.....	3
1.3. Potensi dan Permasalahan	4
1.3.1. Potensi yang Dimiliki.....	4
1.3.2. Permasalahan yang Dihadapi	6
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN BPS PROVINSI NTB.....	9
2.1. Visi BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	9
2.2. Misi BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat	9
2.3. Tujuan BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat	9
2.4. Sasaran Strategis BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	11
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	15
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPS.....	15
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPS Provinsi NTB	17
3.3. Program dan Kegiatan BPS Provinsi NTB	19
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	25
4.1 Target Kinerja.....	25

4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis	25
4.1.2 Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan.....	25
4.2. Kerangka Pendanaan BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	30
BAB V PENUTUP	33
LAMPIRAN	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan, Indikator Kinerja dan Target Provinsi Nusa Tenggara Barat..... 2015-2019.....	11
Tabel 2. Hubungan Visi, Misi, hingga Program dan Kegiatan Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015-2019	21
Tabel 3. Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	26
Tabel 4. Alokasi Anggaran BPS Provinsi NTB 2015-2019 Menurut Program ...	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat	37
Lampiran 2. Pendanaan Per Kegiatan	644

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan berbagai perubahan mendasar terkait pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut mencakup penerapan kerangka penganggaran jangka menengah (Medium-Term Expenditure Framework), penganggaran terpadu (Unified Budget), dan penganggaran berbasis kinerja (Performance Based Budget). Hal tersebut mensyaratkan adanya keterkaitan antara perencanaan, pendanaan, dengan kinerja, serta capaian kinerja dengan akuntabilitas organisasi.

Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 5 menyebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang yaitu entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, unit organisasi, dan Kementerian/Lembaga. Sedangkan penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Selanjutnya dalam pasal 6 dan pasal 7 bahwa penyusunan rencana strategis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

BPS sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melayani masyarakat, dituntut untuk memberikan pelayanan prima yang akuntabel dan transparan. Pelayanan prima, akuntabel dan transparan ini tidak akan terwujud tanpa

adanya dukungan kegiatan administrasi yang mendampingi pelaksanaan kegiatan teknis. Secara khusus, pelayanan prima yang akuntabel dan transparan dilaksanakan melalui upaya pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan *good governance*.

Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*), sangat menuntut dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana kerja yang berkualitas. Untuk itu, BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu menyusun Renstra dalam mendukung pembangunan di bidang teknis dan administrasi statistik yang komprehensif dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsinya yang secara tidak langsung dapat mempercepat terwujudnya *good governance* dan *clean goverment* di Indonesia.

BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melakukan tugasnya selama lima tahun dituangkan dalam Renstra BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019 yang mengacu pada Renstra BPS tahun 2015-2019. Renstra BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019 berisi visi, misi dan tujuan yang diselaraskan dengan visi, misi dan tujuan BPS 2015-2019. Dengan adanya Renstra sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkungan BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien.

Renstra BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019 menjadi acuan bagi seluruh jajaran di lingkungan BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional di bidang statistik selama lima tahun ke depan. Untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra perlu dijabarkan secara lebih rinci ke dalam dokumen rencana tahunan melalui Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

1.2. Kondisi Umum

Sejalan dengan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, langkah penguatan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan menjadi pilihan strategis. Proses perencanaan memerlukan data dan informasi statistik yang berkualitas. Oleh karena itu, ketersediaan data dan informasi statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi rujukan pemerintah tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan beragam kebutuhan lainnya.

Masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, rinci, mudah dipahami, dan tepat waktu. Tuntutan kebutuhan data dan informasi statistik tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, namun secara bertahap terus diupayakan ketersediaannya. Dalam lima tahun ke depan BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat akan melaksanakan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik yang ditetapkan oleh BPS RI untuk penguatan

sistem data dan informasi pembangunan yang sejalan RPJM daerah, dalam rangka mendukung pencapaian keberhasilan pembangunan nasional.

Selama ini, BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menghasilkan beragam data dan indikator sosial-ekonomi. Indikator sosial-ekonomi diperoleh melalui Sensus Penduduk, Sensus Ekonomi, berbagai survei di bidang sosial-ekonomi dan kependudukan. Beberapa indikator tersebut telah dapat dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu.

BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat juga telah memenuhi kebutuhan pemerintah maupun pemerintah daerah, diantaranya Pendataan Sosial Ekonomi 2005, Pendataan Program Perlindungan Sosial 2008, dan Pendataan Usaha Tani 2009 untuk mendukung program-program khusus, seperti Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan sejenisnya.

1.3. Potensi dan Permasalahan

Dalam merencanakan pembangunan di bidang statistik yang akan dilaksanakan dipandang perlu untuk memahami potensi yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi, agar rumusan program dan kegiatan menjadi tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran.

1.3.1. Potensi yang Dimiliki

Secara kelembagaan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia secara keseluruhan. Perpres tersebut menjamin

koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik kepada publik.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional, baik di pusat maupun daerah. BPS menjadi badan yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Kemajuan TIK yang pesat sangat potensial dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan untuk keperluan pengumpulan data, pengolahan data, maupun diseminasi data berbasis TIK mutakhir yang dimiliki BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan potensi untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat ketersediaan serta pelayanan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh konsumen.

Dewasa ini, data dan informasi statistik secara resmi digunakan pada hampir semua level pemerintahan sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan, maupun evaluasi pembangunan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) memuat sejumlah indikator kunci sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, memerlukan ketersediaan data dan informasi statistik pada tingkat wilayah pemerintahan terkecil.

Sejalan dengan kondisi tersebut, meskipun secara umum kesadaran masyarakat baik sebagai responden maupun sebagai konsumen terhadap data dan informasi statistik dalam wilayah Nusa Tenggara Barat dirasakan masih rendah, tetapi sebagai bagian dari pelaksanaan SSN maka penyediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas tidak dapat dihindari. Menyikapi hal ini pemerintah dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019 menempatkan penguatan sistem data dan informasi statistik sebagai bagian dari sistem pendukung manajemen pembangunan nasional.

1.3.2. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi yang prima, akuntabel dan transparan lebih bertumpu pada permasalahan internal. Permasalahan yang menonjol adalah terbatasnya SDM yang profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugasnya. Hal ini sebagai dampak dari cepatnya perkembangan teknologi

informasi yang menuntut sumber daya manusia yang kompeten di semua kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saat ini sumber daya manusia di kabupaten/kota masih belum memadai terutama di bidang administrasi. Selain itu, sistem administrasi yang belum terintegrasi menyebabkan penyediaan sarana dan prasarana kerja yang dimiliki BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat belum seluruhnya dapat diperbaharui.

Dengan meningkatnya jumlah kegiatan statistik sektoral dan kegiatan survey yang bersifat ad hoc yang seringkali terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya berlangsung pada saat yang sama tidak sebanding dengan ketersediaan SDM statistik yang profesional. Keterbatasan jumlah petugas statistik khususnya di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan menyebabkan rendahnya kualitas data yang dihasilkan. Selain itu tuntutan kebutuhan data dari Pemerintah Daerah seringkali tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan SDM yang ada.

Hal-hal lain yang dipandang sebagai permasalahan eksternal adalah rendahnya kesadaran responden, baik rumah tangga, perusahaan, maupun lembaga dalam memberikan informasi dengan benar. Hal ini menyebabkan data yang dihasilkan menjadi kurang berkualitas dan response rate yang rendah.

Selain itu, belum terpenuhinya peningkatan kebutuhan ragam data dan informasi statistik wilayah kecil, termasuk data mikro. Salah satu kendala adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang statistik yang tidak

memperkenankan BPS menyajikan data individu. Sementara itu, sosialisasi UU tersebut belum mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang tugas dan fungsi BPS, sehingga mereka beranggapan bahwa BPS sumber dari segala jenis data dan informasi statistik yang mereka perlukan.

Koordinasi antar instansi belum optimal, sehingga masih sering terjadi duplikasi penyelenggaraan kegiatan statistik yang mengakibatkan penggunaan anggaran yang kurang efisien.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN BPS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2.1. Visi BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Visi BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah **“Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”**

2.2. Misi BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional;
- b. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan
- c. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

2.3. Tujuan BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tujuan I: Peningkatan kualitas data statistik;

Tujuan II: Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik;

Tujuan III: Peningkatan birokrasi yang akuntabel.

Dalam rangka mengantisipasi lingkungan strategis yang berkembang, BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat berperan aktif dalam pembangunan statistik yang dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan menerapkan program Statcap CERDAS (Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia). Empat pilar reformasi birokrasi dilakukan BPS RI dalam tempo 2015-2019, meliputi: (i). Peningkatan kualitas data; (ii). Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; (iii). Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta sarana kerja; dan (iv). Penguatan kelembagaan dan hubungan dengan sumber data dan pengguna data.

Guna memudahkan penilaian pencapaian kinerja, beberapa indikator dan target ditetapkan untuk setiap tujuan secara spesifik. Secara spesifik indikator dan target dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Tujuan, Indikator Kinerja dan Target BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat
2015-2019

No.	Tujuan		Target				
	Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Peningkatan kualitas data statistik	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	90%	90%	92%	92%	94%
2.	Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS	90%	92%	92%	94%	94%
3.	Peningkatan birokrasi yang akuntabel	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	50	52	55	58	60

2.4. Sasaran Strategis BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Secara ringkas sasaran strategis pembangunan statistik dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis dari tujuan pertama: “Peningkatan kualitas data statistik” adalah :
 - 1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS, dengan indikator sasaran :
 - 1.1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik;
 - 1.1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama;

- 1.1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS;
 - 1.1.4. Jumlah Release Data yang tepat waktu;
 - 1.1.5. Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu; dan
 - 1.1.6. Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu.
- 1.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (*respondent engagement*), dengan indikator sasaran :
- 1.2.1. Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survey dengan pendekatan rumahtangga
 - 1.2.2. Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survey dengan pendekatan usaha
 - 1.2.3. Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei dengan pendekatan non rumahtangga non usaha
2. Sasaran strategis dari tujuan kedua: “Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik”, adalah :
- 2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (*user engagement*), dengan indikator sasaran :
 - 2.1.1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS
 - 2.1.2. Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akses data BPS

- 2.1.3. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS
- 3. Sasaran strategis dari tujuan ketiga: "Peningkatan penyelenggaraan /pelaksanaan birokrasi yang akuntabel", adalah
 - 3.1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS, dengan indikator sasaran:
 - 3.1.1. Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
 - 3.1.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I.
 - 3.2. Meningkatnya Pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS, dengan indikator sasaran:
 - 3.2.1. Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPS

Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah.

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Pengguna data senantiasa menginginkan ketersediaan data dengan lebih cepat (*faster*), lebih mudah diperoleh (*easier*), dan lebih berkualitas (*better*). Upaya pengembangan yang dilakukan sampai saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator-indikator sosial-ekonomi. Meskipun demikian, data yang dihasilkan tidak jarang mendapatkan kritik karena dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. Pro dan kontra mengenai data yang dihasilkan mengindikasikan bahwa kualitas data yang tersedia masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta mengacu pada RPJMN tahun 2015-2019, maka BPS menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategisnya.

Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2015 – 2019) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2015 - 2019.

Keinginan masyarakat terhadap data berkualitas, mengisyaratkan bahwa pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada distorsi, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang modern. Untuk meningkatkan tata laksana penyediaan data dan informasi, dibutuhkan upaya yang luar biasa agar dapat mencapai kinerja yang optimal. Peningkatan tersebut bukan berarti bahwa pembangunan statistik hanya difokuskan pada peningkatan teknik statistik semata, namun perbaikan proses manajemen untuk menghasilkan data tersebut juga harus menjadi perhatian.

Guna memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik tersebut, sampai dengan tahun 2014 telah dipublikasikan beberapa indikator ekonomi dan sosial. Indikator ekonomi tersebut mencakup Produk Domestik Bruto, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi (Indeks Harga Konsumen), Ekspor dan Impor, Nilai Tukar Petani, Industri, Pertambangan, Keuangan Daerah, dan berbagai indeks harga lainnya. Sedangkan indikator-indikator sosial dihasilkan melalui survei dan sensus kependudukan, ketenagakerjaan, kemiskinan, potensi desa,

dan sejenisnya. Semua indikator ekonomi dan sosial tersebut telah dapat dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Arah kebijakan penyelenggaraan BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat mengacu pada strategi pembangunan statistik yang terkait dengan visi dan misi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Pembangunan Statistik Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019, sebagai berikut :

- a) Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas.
- b) Peningkatan respons rate.
- c) Memastikan pengendalian mutu melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan statistik.
- d) Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat.
- e) Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS.
- f) Pemenuhan sarana dan prasarana BPS secara akuntabel dalam mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik.
- g) Penciptaan iklim yang kondusif untuk koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan, dan mengacu pada strategi pembangunan statistik nasional, serta memperhatikan RPJM daerah, maka BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat menentukan strategi sebagai rangkaian proses aktivitas untuk mencapai sasaran, sebagai berikut:

- a) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik;
- b) Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data;
- c) Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik;
- d) Meningkatkan Customer Relationship Management;
- e) Meningkatkan kualitas website BPS dan atau PST didukung oleh TIK dan infrastruktur yang memadai;
- f) Meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik;
- g) Mengoptimalkan penyebarluasan informasi, advokasi dan sosialisasi berbagai regulasi terkait;
- h) Mengoptimalkan penyebaran informasi tentang kegiatan statistik BPS; dan
- i) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.

3.3. Program dan Kegiatan

Sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, BPS mempunyai satu Program Teknis dan tiga Program Generik. Sedangkan untuk BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai satu Program Teknis dan dua Program Generik, Program Teknis adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS). Adapun Program Generik BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi: (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS dan (ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS.

Di lingkungan BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat menjalankan program dua program generik yaitu DMPTTL dan PSPA. Program DMPTTL BPS bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas, sedangkan Program PSPA BPS bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk daerah.

Secara lengkap setiap kegiatan beserta indikator kinerja, target pencapaian dan alokasi anggaran yang dibutuhkan disajikan dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2.

Hubungan antara visi, misi, tujuan dan penjabarannya sampai dengan kegiatan disajikan pada tabel 2. Sedangkan Tabel 3 menunjukkan alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam rangka mencapai sasaran dan capaian program selama 2015-2019.

Tabel 2. Hubungan Visi, Misi, hingga Program dan Kegiatan BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015-2019

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pelopor data statistik terpercaya untuk semua	<ol style="list-style-type: none"> Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional; Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas data statistik Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik Peningkatan birokrasi yang akuntabel 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS, Indikator sasaran : <ol style="list-style-type: none"> Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Peningkatan respons rate. Memastikan pengendalian mutu melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan statistik. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik; Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data; Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik; Meningkatkan Customer Relationship Management; Meningkatkan kualitas website BPS dan atau PST didukung oleh TIK dan infrastruktur yang memadai; 	<ol style="list-style-type: none"> PPIS DMPTTL PSPA 	KEGIATAN 2895: BPS Provinsi (Penyediaan dan pelayanan informasi statistik BPS Provinsi)

		<p>2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement), Indikator sasaran :</p> <p>2.1. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga</p> <p>2.2. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha</p> <p>2.3. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha</p> <p>3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement), Indikator sasaran :</p> <p>3.1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data</p>	<p>statistik kepada masyarakat.</p> <p>e) Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS.</p> <p>f) Pemenuhan sarana dan prasarana BPS secara akuntabel dalam mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik.</p> <p>g) Penciptaan iklim yang kondusif untuk koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN.</p>	<p>f) Meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik;</p> <p>g) Mengoptimalkan penyebaran informasi, advokasi dan sosialisasi berbagai regulasi terkait;</p> <p>h) Mengoptimalkan penyebaran informasi tentang kegiatan statistik BPS; dan</p> <p>i) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan</p>	
--	--	---	---	---	--

		<p>dan informasi statistik melalui website BPS</p> <p>3.2. Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS</p> <p>3.3. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS</p> <p>4. Meningkatnya kualitas manajemen Sumber Daya Manusia BPS Indikator sasaran :</p> <p>4.1. Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu</p> <p>4.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I</p> <p>5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Indikator sasaran :</p>			
--	--	---	--	--	--

			5.1. Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat				
--	--	--	---	--	--	--	--

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2015-2019 bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra BPS 2015 – 2019 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan.

4.1.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2015 – 2019 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu tersebut.

Adapun Indikator Sasaran Strategis BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2015 – 2019 disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA (2019)
T.1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas	SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	IKSS 1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	94 %
		IKSS 1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	92 %
		IKSS 1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100 %
		IKSS 1.4. Jumlah release data statistik yang tepat waktu	28

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA (2019)
		IKSS 1.5. Jumlah publikasi/laporan statistik yang terbit tepat waktu	24
		IKSS 1.6. Jumlah publikasi/laporan sensus yang tepat waktu	1
	SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>Respondent Engagement</i>)	IKSS 2.1. Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga	96 %
		IKSS 2.2. Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha	95 %
		IKSS 2.3. Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>)	95 %

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA (2019)
		survei dengan pendekatan non rumah tangga dan non usaha	
T.2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	SS.3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>User Engagement</i>)	IKSS 3.1.Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	18.500
		IKSS 3.2.Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	94%
		IKSS 3.3.Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	90%

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA (2019)
T.3. Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel	SS.4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS	IKSS 4.1. Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	4
		IKSS 4.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal diploma IV atau strata 1	75%
	SS.5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	IKSS 5.1. Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat	60

4.1.2. Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan ketiga program disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan indikator kinerja program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output).

Indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan dari masing-masing program dan kegiatan BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu 2015 – 2019 dapat dilihat pada Lampiran 1.

4.2. Kerangka Pendanaan BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Alokasi Anggaran 2015-2019 Menurut Program

(Juta Rupiah)

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI				
	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. ALOKASI PROGRAM Teknis					
i. Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	9.112	10.023	11.025	12.128	13.340
- Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi	9.112	10.023	11.025	12.128	13.340
B. ALOKASI PROGRAM GENERIK					
i. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	8.872	9.759	10.735	11.808	12.989
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi	8.872	9.759	10.735	11.808	12.989

II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS	2,5	21.237	685	975	2.740
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi	2,5	21.237	685	975	2.740
	Total	17.986,5	41.019	22.445	24.911	29.068,5

BAB V PENUTUP

Renstra BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2015 – 2019 disusun dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan dalam Renstra BPS 2015 – 2019 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Produk dari BPS tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas.

Dalam Renstra BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015 – 2019, setiap tujuan strategis memiliki sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra BPS 2015-2019 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran BPS, baik di pusat maupun di daerah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk memandu bakti BPS kepada nusa dan bangsa.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam jutaan rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat							17.987	41.019	22.445	24.911	29.069	135.431
	SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS											1. Bidang Statistik Sosial 2. Bidang Statistik Produksi 3. Bidang Statistik Distribusi 4. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik 5. Deputi Bidang IPDS 6. Bagian Tata Usaha
	1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	90%	90%	90%	90%	90%						
	1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	80%	83%	86%	89%	92%						
	1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100%	100%	100%	100%	100%						

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam jutaan rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	1.4. Jumlah Release Data yang tepat waktu	29	28	28	28	28						
	1.5. Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu	27	26	27	26	25						
	1.6. Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu	10	1	1	1	1						
	SS.2. Meningkatkan kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement)											
	2.1. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga	94%	95%	95%	95%	95%						
	2.2. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha	93%	93%	93%	93%	93%						

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam jutaan rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	2.3. Persentase pemasangan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	93%	93%	93%	93%	93%						
	SS.3. Meningkatkan kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)											
	3.1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS	18000	18200	18300	18400	18500						
	3.2. Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS	90%	90%	90%	90%	90%						
	3.3. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap	90%	90%	90%	90%	90%						

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam jutaan rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	pemenuhan sarana dan prasarana BPS											
	SS.4. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia BPS											
	4.1. Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	4%	4%	4%	4%	4%						
	4.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	60%	60%	65%	70%	75%						
	SS.5. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS											
	5.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	50	52	55	58	60						

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam jutaan rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
PROGRAM : Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik							9.112	10.023	11.025	12.128	13.340	55.628
KEGIATAN 2895: BPS Provinsi (Penyediaan dan pelayanan informasi statistik BPS Provinsi)							9.112	10.023	11.025	12.128	13.340	55.628
	Jumlah Laporan Pengembangan Metodologi Sensus dan survei	1	1	1	1	1	472,9	520,2	572,2	629,5	692,4	BPS Provinsi
	Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100%	100%	100%	100%	100%						
	Jumlah dokumen updating peta	9	1	1	1	1						
	Jumlah Laporan Diseminasi Statistik	1	1	1	1	1	2,3	2,5	2,8	3,1	3,4	
	Jumlah Laporan Diseminasi Statistik yang terbit tepat waktu	1	1	1	1	1						
	Persentase pemasukan dokumen	90%	90%	92%	92%	94%						

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam jutaan rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	(response rate) survei kebutuhan data											
	Jumlah Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	3	1	1	1	1	494,3	543,7	598	657,9	723,6	
	Jumlah Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang terbit tepat waktu	3	1	1	1	1						
	Jumlah Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang memiliki ISSN/ISBN	3	1	1	1	1						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei ketenagakerjaan dan kependudukan dengan	95%	95%	95%	96%	96%						

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam jutaan rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	pendekatan rumah tangga											
	Jumlah publikasi/laporan Sensus Penduduk				1	1				1.693,3	2.962,5	
	Jumlah publikasi/laporan Sensus Penduduk yang terbit tepat waktu				1	1						
	Jumlah publikasi/laporan Survei Penduduk Antar Sensus	1					2197,9					
	Jumlah publikasi/laporan Survei Penduduk Antar Sensus yang terbit tepat waktu	1										
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) Survei Penduduk Antar Sensus	95%										
	Jumlah Publikasi/Laporan	2	1	1	1	1	872,7	959,9	1055,9	1161,6	1277,6	

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam jutaan rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Statistik Kesejahteraan Rakyat											
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang terbit tepat waktu	2	1	1	1	1						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang memiliki ISSN/ISBN	2	1	1	1	1						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Kesejahteraan Rakyat dengan pendekatan rumah tangga	94%	94%	94%	95%	95%						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial	1	1	1	2	1	72,7	80	88	96,8	106,5	

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam jutaan rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang terbit tepat waktu	1	1	1	2	1						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang memiliki ISSN/ISBN	1	1	1	1	1						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) Survei Ketahanan Sosial dengan pendekatan rumah tangga	95%	95%	95%	95%	95%						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) Survei Ketahanan Sosial dengan pendekatan non	95%	95%	95%	95%	95%						

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam jutaan rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	rumah tangga non usaha											
	Jumlah Publikasi/Laporan Pendataan Potensi Desa				1				2.448	1.000		
	Jumlah Publikasi/Laporan Pendataan Potensi Desa yang tepat waktu				1							
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) Pendataan Potensi Desa				100%							
	Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial	1					2.002					
	Persentase Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial yang selesai tepat waktu	100%										
	Jumlah Publikasi/Laporan	15	4	4	4	4	226	248	273	301	331	

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam jutaan rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan											
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang terbit tepat waktu	15	4	4	4	4						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang memiliki ISSN/ISBN	5	4	4	4	4						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) Survei Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan	90%	90%	93%	94%	94%						

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam jutaan rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	pendekatan rumah tangga											
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) Survei Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pendekatan usaha	90%	90%	93%	94%	94%						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) Survei Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	90%	90%	93%	94%	94%						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	2	2	2	2	2	41	46	50	55	61	

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam jutaan rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang terbit tepat waktu	2	2	2	2	2						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang memiliki ISSN/ISBN	2	2	2	2	2						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) Survei Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dengan pendekatan rumah tangga	90%	90%	90%	92%	92%						
	Persentase pemasukan	90%	90%	90%	92%	92%						

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam jutaan rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	dokumen (<i>response rate</i>) Survei Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dengan pendekatan usaha											
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) Survei Survei Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	90%	90%	90%	92%	92%						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi	3	3	3	3	3	759,2	835,1	918,6	1010,5	1111,5	
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan	3	3	3	3	3						

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam jutaan rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi yang terbit tepat waktu											
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi yang memiliki ISSN/ISBN	3	3	3	3	3						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi dengan pendekatan usaha	90%	90%	92%	94%	95%						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi	1	2	2	1	1	412	454	499	549	604	
	Jumlah Publikasi/Laporan	1	2	2	1	1						

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam jutaan rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Sensus Ekonomi 2016 yang terbit tepat waktu											
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Sensus Ekonomi 2016		100%	100%								
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga	3	3	3	3	3	941	631.4	694.5	764.0	840.3	
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga yang terbit tepat waktu	3	3	3	3	3						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga yang memiliki ISSN/ISBN	3	3	3	3	3						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik harga dengan	95%	95%	95%	96%	96%						

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam jutaan rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	pendekatan rumah tangga											
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik harga dengan pendekatan usaha	95%	95%	95%	96%	96%						
	Jumlah Publikasi/Laporan Survei Harga Biaya Hidup		1	1				403.6	2.000			
	Jumlah Publikasi/Laporan Survei Harga Biaya Hidup yang terbit tepat waktu		1	1								
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei biaya hidup		96%	96%								
	Jumlah Publikasi/Laporan Survei Penyempurnaan Diagram Timbang (2017=100)			1					659.73			

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam jutaan rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah Publikasi/Laporan Survey Penyempurnaan Diagram Timbang (2017=100) yang terbit tepat waktu			1								
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survey Penyempurnaan Diagram Timbang (2017=100)			94%								
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata	1	1	1	1	1	104,7	115,2	126,7	139,4	153,4	
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang terbit tepat waktu	1	1	1	1	1						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik	1	1	1	1	1						

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam jutaan rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Kuangan, TI, dan Pariwisata yang memiliki ISSN/ISBN											
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata dengan pendekatan usaha	95%	95%	95%	96%	96%						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik survei statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	95%	95%	95%	96%	96%						
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi	1	1	1	1	1	344.8	379.3	417.2	458.9	504.8	
	Jumlah Publikasi/Laporan	1	1	1	1	1						

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam jutaan rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Neraca Produksi yang terbit tepat waktu											
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang memiliki ISSN/ISBN	1	1	1	1	1						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei neraca produksi dengan pendekatan usaha	90%	90%	92%	94%	95%						
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran	1	1	1	1	1	9,9	10,9	12	13,2	14,6	
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang terbit tepat waktu	1	1	1	1	1						
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang	1	1	1	1	1						

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam jutaan rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	memiliki ISSN/ISBN											
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei neraca pengeluaran dengan pendekatan rumah tangga	100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei neraca pengeluaran dengan pendekatan usaha	90%	90%	92%	94%	95%						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei neraca pengeluaran dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	90%	90%	92%	94%	95%						

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam jutaan rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah Publikasi/Laporan analisis dan pengembangan statistik	3	3	3	3	3	134,5	147,9	162,7	179	196,9	
	Jumlah Publikasi/Laporan analisis dan pengembangan statistik yang tebit tepat waktu	3	3	3	3	3						
	Jumlah Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang memiliki ISSN/ISBN	3	3	3	3	3						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei analisis dan pengembangan statistik dengan pendekatan rumah tangga	90%	90%	92%	94%	95%						

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam jutaan rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei analisis dan pengembangan statistik dengan pendekatan usaha	90%	90%	92%	94%	95%						
PROGRAM 01 : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS							8.872	10.023	11.025	12.128	13.340	55.628
KEGIATAN 2886 : (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi)							8.872	10.023	11.025	12.128	13.340	55.628
	Layanan Perkantoran	12	12	12	12	12						Bagian Tata Usaha
	Jumlah Laporan Dukungan Manajemen	4	4	4	4	4						
	Persentase pembayaran upah dan gaji yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam jutaan rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Persentase Sarana dan Prasarana TIK dalam kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase Sarana dan Prasarana Lainnya dalam kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%						
PROGRAM 02: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							2,5	21.237	685	975	2740	25.639,5
KEGIATAN 2891:(Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi							2,5	21.237	685	975	2740	25.639,5
	Jumlah Pengadaan kendaraan Bermotor		2			4		50			2.000	Bagian Tata Usaha
	Persentase pengadaan kendaraan bermotor yang diselesaikan		100%			100%						
	Jumlah pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi		2	1		2		190	100		30	

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam jutaan rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Persentase pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang diselesaikan		100%	100%		100%						
	Jumlah Pengadaan kebutuhan peralatan dan fasilitas	1	179		10	9	2,5	2.099		90	110	
	Persentase pengadaan peralatan dan fasilitas yang diselesaikan	100%	100%		100%	100%						
	Jumlah pengadaan kebutuhan gedung dan bangunan yang memadai		4	3	4	2		18.898	585	885	600	
	Persentase pengadaan tanah dan pengadaan, rehabilitasi, revitalisasi, dan pembangunan gedung/bangunan yang diselesaikan		100%	100%	100%	100%						
	Meningkatnya pengguna layanan yang puas terhadap	90%	90%	90%	90%	90%						

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam jutaan rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	sarana dan prasarana BPS											
	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	90%	90%	90%	90%	90%						
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%						

Lampiran 2. Pendanaan Per Kegiatan

PROGRAM/KEGIATAN		ALOKASI				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PROGRAM TEKNIS (PPIS) BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat	9.112.265.000	10.023.000.000	11.025.000.000	12.128.000.000	13.340.000.000
1	KEGIATAN 2895: BPS Provinsi (Penyediaan dan pelayanan informasi statistik BPS Provinsi)	9.112.265.000	10.023.000.000	11.025.000.000	12.128.000.000	13.340.000.000
B.	PROGRAM GENERIK (DMPTTL dan PSPA) BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat					
I.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPS Lainnya	8.872.512.000	9.759.000.000	10.735.000.000	11.808.000.000	12.969.000.000
1	KEGIATAN 2886 : (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi)	8.872.512.000	9.759.000.000	10.735.000.000	11.808.000.000	12.969.000.000
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS NTB	2.500.000	21.237.000.000	685.000.000	975.000.000	2.740.000.000
1	KEGIATAN 2891: (Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi)	2.500.000	21.237.000.000	685.000.000	975.000.000	2.740.000.000

PELOPOR DATA STATISTIK TERPERCAYA UNTUK SEMUA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Gunung Rinjani No.2 Mataram 83125
Telp. (0370) 621385, 623801, 638321; Fax. (0370) 623801
email : bps5200@bps.go.id, <http://ntb.bps.go.id>